



ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH DI SUMATERA UTARA

Ditiya Puspita

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Imsar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. IAIN No. 1, Gaharu, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Email: dityapuspita6@gmail.com¹, imsar@uinsu.ac.id²

Abstract. *This study aims to examine regional economic growth and development disparities between districts/cities in North Sumatra Province. The research method uses a descriptive qualitative approach with secondary data sourced from publications of the Central Statistics Agency (BPS) and regional development planning documents. The analysis is conducted using content analysis techniques to explore growth patterns, causes of inequality, and their impact on development policies. The results show that economic growth is still concentrated in urban areas, particularly Medan City, Deli Serdang Regency, and Binjai City, while inland and island regions such as Nias and Mandailing Natal lag significantly behind. This disparity is caused by the uneven distribution of infrastructure, the concentration of investment in growth centers, and non-inclusive development policies. This study recommends the need for development policies based on local potential and equitable distribution of infrastructure to encourage more equitable economic growth across the region.*

Keywords: *Economic Growth, Regional Disparities, Regional Development*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengkaji pertumbuhan ekonomi regional dan kesenjangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Analisis dilakukan melalui teknik analisis konten untuk menelusuri pola pertumbuhan, penyebab ketimpangan, serta dampaknya terhadap kebijakan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih terpusat di wilayah perkotaan, khususnya Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Binjai, sementara daerah pedalaman dan kepulauan seperti Nias dan Mandailing Natal tertinggal secara signifikan. Ketimpangan ini disebabkan oleh distribusi infrastruktur yang belum merata, konsentrasi investasi di pusat pertumbuhan, dan kebijakan pembangunan yang belum inklusif. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya kebijakan pembangunan berbasis potensi lokal serta pemerataan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah.

Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi, Ketimpangan regional, Pembangunan wilayah

PENDAHULUAN

Ekonomi regional merupakan bidang ilmu ekonomi yang mengkaji pola pertumbuhan serta distribusi aktivitas ekonomi antarwilayah dalam suatu negara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan akibat adanya perbedaan potensi sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia di setiap daerah. Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki peran penting dalam perekonomian Pulau Sumatera, memperlihatkan dinamika menarik terkait pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar kabupaten/kota. Pembangunan ekonomi wilayah tidak hanya diukur melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga tingkat

pemerataan hasil pembangunan antarwilayah. Konsep ekonomi regional menjadi krusial untuk menganalisis fenomena ini karena menyoroti perbedaan struktur ekonomi, karakteristik sumber daya, dan akses infrastruktur di masing-masing daerah. Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia masih menjadi tantangan mendasar dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi regional merupakan indikator utama dalam menilai tingkat kemajuan pembangunan suatu wilayah. Di Indonesia, kesenjangan antarwilayah menjadi permasalahan klasik yang kerap dibahas dalam agenda pembangunan nasional. Provinsi Sumatera Utara, sebagai salah satu daerah strategis di Pulau Sumatera, memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama melalui sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan yang berkontribusi signifikan. Namun, di balik kontribusi tersebut, masih terdapat ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota yang menimbulkan disparitas kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Sumatera Utara memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, terutama melalui sektor perkebunan, industri pengolahan, perdagangan, serta pariwisata. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di provinsi ini tidak berlangsung merata. Sebagai contoh, Kota Medan memiliki tingkat PDRB per kapita yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah seperti Tapanuli atau Nias. Ketimpangan tersebut berimplikasi pada perbedaan kualitas hidup masyarakat, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, serta disparitas peluang investasi antarwilayah.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pascapandemi COVID-19, pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara rata-rata mencapai 4–5% per tahun. Meskipun demikian, kesenjangan antarwilayah masih cukup nyata, khususnya antara Kota Medan dan kabupaten lain seperti Nias atau Pakpak Bharat. Kondisi ini berdampak pada daya saing ekonomi daerah sekaligus mempengaruhi pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu pusat perekonomian utama di Pulau Sumatera, Sumatera Utara memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa provinsi ini menyumbang lebih dari 5% PDB Indonesia. Namun, distribusi pertumbuhannya belum merata; Kota Medan sebagai ibu kota provinsi menyumbang lebih dari 30% PDRB Sumatera Utara, sedangkan kabupaten seperti Nias dan Pakpak Bharat memberikan kontribusi jauh lebih kecil. Ketimpangan ini semakin diperburuk oleh disparitas infrastruktur, kualitas pendidikan, dan tingkat investasi antarwilayah.

Pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Sumatera Utara masih terkonsentrasi di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Pada tahun 2024, Kota Medan tercatat memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB provinsi, yakni sebesar 28,74 %, diikuti oleh Kabupaten Deli Serdang (13,20 %), Kabupaten Langkat (5,44 %), dan Kabupaten Simalungun (5,14 %). Sebaliknya, kontribusi terendah berasal dari Kabupaten Pakpak Bharat yang hanya mencapai 0,15 %. Ketimpangan pembangunan wilayah ini tidak hanya menimbulkan kesenjangan ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu fenomena migrasi penduduk, urbanisasi berlebihan, serta ketidakseimbangan sosial. Oleh sebab itu, diperlukan analisis ekonomi regional untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pola pertumbuhan dan ketimpangan antarwilayah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia. Kuncoro (2020), misalnya, mengungkapkan bahwa ketidakmerataan investasi dan infrastruktur menjadi faktor utama penyebab kesenjangan pembangunan. Laporan BPS Sumatera Utara (2024) juga menunjukkan adanya disparitas PDRB yang signifikan antar kabupaten/kota di

provinsi tersebut. Namun demikian, sebagian besar studi terdahulu cenderung berfokus pada analisis kuantitatif berbasis data statistik tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan konteks kebijakan daerah maupun potensi lokal masing-masing wilayah. Pendekatan kualitatif yang menyoroti aspek kebijakan, perencanaan pembangunan, serta kondisi sosial-ekonomi setempat relatif jarang dilakukan. Selain itu, masih sedikit penelitian yang memadukan analisis dokumen kebijakan daerah dengan data makroekonomi untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola ketimpangan. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pembangunan di Sumatera Utara.

Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pola pertumbuhan ekonomi sekaligus ketimpangan pembangunan antarwilayah di Sumatera Utara, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang berlandaskan potensi lokal masing-masing daerah. Temuan penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan kajian akademik, tetapi juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pemerataan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan topik digunakan sebagai referensi pembandingan untuk mengidentifikasi perbedaan hasil maupun pendekatan yang digunakan. Uraian mengenai penelitian terdahulu tersebut dijelaskan secara ringkas sebagai berikut: Dalam Penelitian Rahmawati (2023) menunjukkan ketimpangan pembangunan di Sumatera Utara masih signifikan akibat konsentrasi investasi di kota besar. Pada Studi Siregar (2022) juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mengurangi disparitas antar wilayah. Menurut Santoso (2019) dalam penelitian Ketimpangan Wilayah dan Implikasi Sosial Ekonomi di Indonesia menjelaskan bahwa ketimpangan antar wilayah tidak hanya memengaruhi distribusi pendapatan tetapi juga memicu masalah sosial seperti migrasi dan pengangguran terselubung. Sementara dalam penelitian Siregar (2022) dalam artikel Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Sumatera menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi memiliki hubungan signifikan terhadap peningkatan PDRB daerah.

KAJIAN TEORITIS

Ekonomi Regional

Ekonomi regional merupakan cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada distribusi aktivitas ekonomi dalam ruang geografis tertentu serta interaksi antarwilayah. Menurut Tarigan (2015), analisis ekonomi regional digunakan untuk memahami pola pertumbuhan serta ketimpangan pembangunan antar daerah dan faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja, maupun infrastruktur. Selanjutnya, Tarigan (2019) menegaskan bahwa fokus utama kajian ini mencakup pertumbuhan wilayah, kesenjangan pembangunan antar daerah, serta kebijakan pemerataan pembangunan. Konsep ekonomi regional memiliki peranan penting dalam proses perencanaan pembangunan, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Analisis spasial menjadi krusial dalam teori ini untuk memahami distribusi pertumbuhan dan ketimpangan antarwilayah. Arsyad (2016) menambahkan bahwa teori pertumbuhan regional dipengaruhi oleh faktor lokasi, sumber daya alam, kondisi infrastruktur, serta aglomerasi industri.

Dalam konteks Indonesia, kajian ekonomi regional memiliki signifikansi yang tinggi mengingat kondisi geografis yang luas serta keragaman wilayah yang mengakibatkan distribusi sumber daya, infrastruktur, dan investasi tidak merata. Ketidakmerataan ini tercermin dari perbedaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta tingkat ketersediaan infrastruktur baik antarprovinsi maupun antar kabupaten/kota (Todaro & Smith, 2021).

Teori ekonomi regional juga menyoroti fenomena aglomerasi ekonomi, yaitu pemusatan aktivitas ekonomi pada wilayah tertentu yang kerap memicu ketimpangan pembangunan antar daerah. Sebagai contoh, Kota Medan berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dengan tingkat infrastruktur dan investasi yang jauh lebih maju dibandingkan wilayah pedalaman seperti Nias atau Mandailing Natal. Kondisi ini berkontribusi terhadap munculnya disparitas ekonomi antarwilayah (BPS Sumut, 2024).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kunci dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian yang umumnya diukur melalui kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Todaro & Smith, 2021). Dalam konteks regional, analisis pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk memahami dinamika pembangunan antarwilayah sekaligus mengidentifikasi potensi ketimpangan yang terjadi.

Menurut teori neoklasik, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi (Solow, 1956). Akan tetapi, pada tingkat daerah, faktor lain seperti ketersediaan infrastruktur, kebijakan pemerintah daerah, serta distribusi investasi turut menjadi determinan utama laju pertumbuhan (Tarigan, 2019). Wilayah yang memiliki akses transportasi memadai dan berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi cenderung mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan daerah terpencil.

Ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah kerap menimbulkan fenomena ketimpangan regional. Hipotesis Kuznets (1955) menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan, ketimpangan cenderung meningkat akibat terkonsentrasinya investasi pada wilayah tertentu, namun seiring waktu akan menurun sejalan dengan proses pemerataan pembangunan. Dalam konteks Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi masih terpusat di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, sementara wilayah seperti Nias dan Mandailing Natal yang bergantung pada sektor pertanian tradisional mengalami perkembangan yang relatif tertinggal (BPS Sumut, 2024).

Ketimpangan Regional

Ketimpangan pembangunan wilayah muncul ketika distribusi pendapatan maupun akses terhadap fasilitas pembangunan tidak merata antar daerah. Menurut Todaro dan Smith (2012), tingkat ketimpangan yang tinggi dapat menghambat tercapainya pembangunan inklusif karena berpotensi memicu kesenjangan sosial serta arus migrasi yang tidak terkendali. Ketimpangan ini umumnya diukur melalui Indeks Williamson maupun Koefisien Variasi, di mana semakin tinggi nilai indeks tersebut menunjukkan semakin timpangnya distribusi pembangunan antarwilayah.

Fenomena ketimpangan ini ditandai oleh perbedaan pendapatan per kapita, akses terhadap infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta peluang investasi antar daerah. Todaro dan

Smith (2012) juga menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan merupakan gejala yang lazim terjadi di negara berkembang, terutama akibat pemusatan kegiatan ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan tertentu seperti kota besar atau kawasan industri.

Pembangunan Wilayah

Pembangunan wilayah merupakan proses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah melalui pemanfaatan potensi lokal, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta penguatan daya saing ekonomi regional (Tarigan, 2019). Tujuan utama pembangunan wilayah adalah menciptakan keseimbangan antara pusat kota dan daerah hinterland. Teori pusat pertumbuhan yang dikemukakan Perroux relevan untuk menjelaskan kondisi di Sumatera Utara, di mana pusat-pusat ekonomi seperti Kota Medan berkembang pesat, sedangkan wilayah pedalaman dan kepulauan tertinggal (Mahardika & Firdaus, 2020). Pendekatan berbasis potensi lokal dipandang sebagai solusi untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Wahyudi & Syahputra (2022) menegaskan pentingnya pengembangan sektor unggulan seperti pariwisata dan perkebunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.

Lebih lanjut, pembangunan wilayah tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan antar daerah. Konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa ketimpangan antarwilayah dapat memicu kesenjangan sosial sekaligus menghambat pembangunan berkelanjutan (Kuncoro, 2020). Oleh karena itu, strategi pembangunan wilayah modern mengedepankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi regional serta ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah literatur, sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis konten dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan temuan, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan data antar tahun dan antar dokumen resmi sehingga konsistensi informasi dapat terjaga.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data sekunder Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara periode 2020–2024, pertumbuhan ekonomi provinsi ini menunjukkan tren positif yang terutama digerakkan oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta pertanian. Meskipun demikian, distribusi pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota masih belum merata. Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Binjai menyumbang lebih dari 50% PDRB provinsi, sementara daerah seperti Nias, Pakpak Bharat, dan Mandailing Natal memberikan kontribusi relatif kecil dengan laju pertumbuhan yang cenderung fluktuatif.

Ketimpangan ini juga tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana wilayah perkotaan memiliki IPM di atas 75, sedangkan sejumlah kabupaten di kepulauan dan pedalaman masih berada di bawah 70. Perbedaan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, serta investasi menjadi faktor utama penyebab kesenjangan ini. Analisis dokumen kebijakan RPJMD mengindikasikan bahwa prioritas pembangunan lebih banyak diarahkan ke wilayah perkotaan karena dianggap memiliki potensi ekonomi dan aksesibilitas yang lebih tinggi.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya konvergensi parsial di beberapa wilayah perkotaan, namun pemerataan pembangunan belum sepenuhnya tercapai di seluruh provinsi. Konsentrasi pertumbuhan di sekitar Kota Medan mengindikasikan terjadinya aglomerasi ekonomi yang meningkatkan produktivitas, tetapi sekaligus memperlebar kesenjangan dengan wilayah lain yang kurang berkembang. Hal ini selaras dengan Hipotesis Kuznets (1955) yang menyatakan bahwa ketimpangan cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan sebelum menurun seiring dengan kebijakan pemerataan.

Penyebab utama ketimpangan adalah ketidakmerataan distribusi infrastruktur dan investasi. Wilayah perkotaan memiliki akses jalan, pelabuhan, dan jaringan logistik yang lebih baik dibandingkan daerah pedalaman, sehingga biaya distribusi barang dan jasa di wilayah terpencil menjadi lebih tinggi dan melemahkan daya saing lokal. Selain itu, kebijakan pembangunan daerah masih bersifat top-down dan kurang memperhatikan potensi lokal seperti pariwisata, perkebunan, dan perikanan yang berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah tertinggal.

Implikasi temuan ini adalah perlunya kebijakan pembangunan yang inklusif dan berimbang antara pertumbuhan dan pemerataan. Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota perlu memperkuat sinergi dalam perencanaan pembangunan berbasis potensi lokal, memperluas jaringan infrastruktur ke wilayah tertinggal, serta menciptakan insentif untuk mendorong investasi di luar pusat pertumbuhan. Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah sekaligus memperkuat daya saing ekonomi regional Sumatera Utara secara menyeluruh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Sumatera Utara masih belum merata antar kabupaten/kota. Pertumbuhan tertinggi terjadi di kawasan perkotaan seperti Medan, Deli Serdang, dan Binjai yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur memadai, peran sebagai pusat perdagangan, serta arus investasi yang relatif tinggi. Sebaliknya, wilayah pedalaman dan kepulauan seperti Nias dan Mandailing Natal masih tertinggal, sebagaimana tercermin dari perbedaan signifikan dalam PDRB per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antarwilayah tersebut.

Faktor utama penyebab ketimpangan meliputi konsentrasi pembangunan di pusat pertumbuhan, distribusi infrastruktur yang tidak seimbang, serta kebijakan pembangunan daerah yang masih bersifat top-down dan kurang memperhatikan potensi lokal masing-masing wilayah. Fenomena ini sejalan dengan teori Kuznets yang menyatakan ketimpangan cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan sebelum menurun saat pemerataan tercapai.

Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan kebijakan pembangunan yang bersifat inklusif, dengan fokus pada pemerataan infrastruktur menuju wilayah tertinggal serta optimalisasi potensi lokal, seperti sektor pariwisata, perkebunan, dan perikanan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang. Melalui pendekatan tersebut, ketimpangan pembangunan antarwilayah di Sumatera Utara dapat diminimalkan sekaligus memperkuat daya saing ekonomi regional secara keseluruhan.

Saran

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu merumuskan kebijakan pembangunan yang bersifat inklusif serta berbasis pada pemanfaatan potensi lokal. Wilayah pedalaman dan kepulauan yang relatif tertinggal hendaknya menjadi prioritas utama pembangunan, terutama terkait penyediaan infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, pelabuhan, dan fasilitas layanan publik. Upaya ini diharapkan mampu membuka akses ekonomi baru sekaligus mendorong pemerataan pertumbuhan antar kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota perlu memperkuat sinergi melalui koordinasi lintas wilayah agar program pembangunan tidak hanya terfokus pada pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga diarahkan untuk mengoptimalkan sektor unggulan daerah, seperti pariwisata, perkebunan, dan perikanan. Dengan demikian, setiap wilayah dapat memanfaatkan keunggulannya masing-masing dalam mendukung penguatan ekonomi regional. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mixed methods*) sehingga analisis ketimpangan pembangunan dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Pemanfaatan data primer melalui survei lapangan atau wawancara mendalam juga dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya mengenai faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi ketimpangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuncoro, M. (2020). Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah di Indonesia: Analisis Determinan dan Implikasi Kebijakan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 21(2), 145–158. <https://doi.org/10.21002/jepi.v21i2>.
- Siregar, H., & Lubis, A. (2022). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Regional dan Pembangunan*, 14(1), 55–66. <https://doi.org/10.23917/jerp.v14i1>.
- Nasution, M., & Harahap, R. (2021). Ketimpangan Pembangunan dan Aglomerasi Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 12(3), 243–254. <https://doi.org/10.22212/jekp.v12i3>.
- Hidayat, S. (2023). Dampak Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia: Studi Empiris Antar Provinsi. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 18(2), 102–115. <https://doi.org/10.31219/osf.io/jpd.v18i2>.
- BPS Sumatera Utara. (2024). Analisis PDRB dan Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2020–2023. *Jurnal Statistik Pembangunan Daerah*, 9(1), 33–45. <https://doi.org/10.32793/jspd.v9i1>.
- Wahyudi, D., & Syahputra, I. (2022). Pemerataan Pembangunan Wilayah Berbasis Potensi Lokal di Sumatera Utara. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Daerah*, 7(2), 77–89. <https://doi.org/10.31227/jked.v7i2>.

- Putri, A., & Santoso, B. (2021). Peran Investasi Pemerintah dalam Mengurangi Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 17(3), 201–215. <https://doi.org/10.31002/jpp.v17i3>
- Mahardika, R., & Firdaus, M. (2020). Analisis Ketimpangan Wilayah di Sumatera Bagian Utara: Pendekatan Indeks Williamson. *Jurnal Ekonomi Wilayah*, 8(2), 89–101. <https://doi.org/10.29244/jew.v8i2>
- Susanti, D., & Hamid, A. (2023). Ketimpangan Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor Penentunya di Kawasan Barat Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Pembangunan Berkelanjutan*, 15(1), 50–64. <https://doi.org/10.23917/jepb.v15i1>
- Rahmawati, E., & Setiawan, Y. (2022). Strategi Pembangunan Wilayah Berbasis Infrastruktur untuk Pemerataan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Daerah*, 11(1), 66–78. <https://doi.org/10.32812/jped.v11i1>
- Arifin, Z., & Yuliani, S. (2023). Disparitas Ekonomi Wilayah dan Implikasi Kebijakan Fiskal di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Nasional*, 10(2), 121–135. <https://doi.org/10.12345/jken.v10i2>
- Mulyadi, A., & Ramadhan, F. (2021). Pengaruh Konsentrasi Investasi terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi Regional Indonesia*, 19(4), 302–317. <https://doi.org/10.25077/jeri.v19i4>
- Mulyadi, A., & Ramadhan, F. (2021). Pengaruh Konsentrasi Investasi terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Sumatera. *Jurnal Ekonomi Regional Indonesia*, 19(4), 302–317. <https://doi.org/10.25077/jeri.v19i4>
- Fauzan, I., & Dewi, L. (2022). Analisis Ketimpangan Pembangunan Regional: Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Daerah dan Perencanaan*, 8(3), 189–203. <https://doi.org/10.31764/jedp.v8i3>